

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 46 TAHUN 2020 SERI .B

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN CIREBON DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Cirebon dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 91);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 7, Seri E.3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E);
 11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 3, Seri E.3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN CIREBON DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Cirebon ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
4. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Bupati adalah Bupati Cirebon.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.
8. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
12. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,
 - e. pembentukan sistem informasi,

- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi,
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan,
- h. penguatan penegakan hukum,
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat,
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna, dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Cirebon dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua
Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan

- c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Juli 2020

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 46 SERI .

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 44 TAHUN 2020 SERI

TANGGAL : 15 JULI 2020

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN CIREBON DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018-2025

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Cirebon

| INDIKATOR | TAHUN | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun) | 464.624,88 | 470.990,24 | 477.442,80 | 483.983,77 | 490.614,35 | 497.335,76 | 504.149,26 | 511.056,11 |
| Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Cirebon (Ton/Tahun) | 83.632,48 | 94.198,05 | 105.037,42 | 116.156,10 | 127.559,73 | 134.280,66 | 141.161,79 | 153.316,83 |

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Cirebon

| INDIKATOR | TAHUN | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Potensi Timbunan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun) | 464.624,88 | 470.990,24 | 477.442,80 | 483.983,77 | 490.614,35 | 497.335,76 | 504.149,26 | 511.056,11 |
| Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas | 73% | 80% | 75% | 74% | 73% | 72% | 71% | 70% |

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Cirebon (Ton/Tahun) | 339.176,16 | 376.792,19 | 358.082,10 | 358.147,99 | 358.148,47 | 358.081,75 | 357.945,98 | 357.739,28 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 46 SERI . 3

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 44 TAHUN 2020 SERI
 TANGGAL : 15 JULI 2020
 TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN CIREBON DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN CIREBON DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 - 2025

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | | | |
|-----|---|--|---|---------------|---|---------------|------|------|------|------|------|------------------------|--|---|---|--|------------------------|--|--|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | |
| 1. | Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga | Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga | 1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappelitbangda | Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kecamatan | | | |
| | | | | | 2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | a) Pembatasan timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PMPTSP, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kecamatan, Kelurahan/Desa | |
| | b) Pendaunan ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PMPTSP, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kecamatan, Kelurahan/Desa | | | | | | |
| | c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PMPTSP, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kecamatan, Kelurahan/Desa | | | | | | |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | | | |
|-----|-----------|----------|---|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|--------------|------------------|---|--|--|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | |
| | | | 3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kecamatan, Kelurahan/Desa | |
| | | | a) Pembatasan timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PMPTSP, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kecamatan, Kelurahan/Desa |
| | | | b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PMPTSP, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kecamatan, Kelurahan/Desa |
| | | | c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PMPTSP, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kecamatan, Kelurahan/Desa |
| | | | 4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) Pembatasan timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PMPTSP, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kecamatan, Kelurahan/Desa |
| | | | b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan | Dokumen/tahun | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PMPTSP, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kecamatan, Kelurahan/Desa |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | |
|-----|-----------|---|---|--|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------------|--|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2025 |
| | | | Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | | | | | | | | | | | Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kecamatan, Kelurahan/Desa |
| | | | c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Dinas PMPTSP, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kecamatan, Kelurahan/Desa |
| | | b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah | 1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam: a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun | - | 1 | - | - | - | - | - | | | Bappelitbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah | Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah | | | | | | | | | | DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Cirebon, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat |
| | | c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusattingkat pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan | Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah | Pertemuan/tahun | - | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | DPR RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Cirebon, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | |
|-----|-----------|--|---|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|--------------|------------------|---|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | |
| | | Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat |
| | | d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada: a) Pemerintah Pusat b) Pemerintah Provinsi Jawa Barat c) DPRD Kabupaten Cirebon | Konsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/tahun Konsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat/tahun Konsultasi dengan DPRD Kabupaten Cirebon | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Dinas Perumahan, Permukiman Kawasan dan Pertanahan, Bappelitbangda, Badan Keuangan dan Aset Daerah |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | |
|-----|-----------|---|---|---------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|--------------|---|--|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | |
| | | | 2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Orang/ tahun | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan/Desa |
| | | | 3) Pembentukan bank sampah induk | Unit/ tahun | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Cirebon, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | e. Pembentukan sistem informasi | Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPSS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) | Dokumen/ tahun | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappelitbangda |
| | | f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) | 1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal 2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat | Kelurahan dan Desa Unit/ Kecamatan | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, Kelurahan/Desa Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, |

| NO. KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|---------------|--|--|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|---|--|------------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | |
| | | 3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan | Unit/Kawasan (Pasar Tradisional) | - | - | - | 5 | 10 | 4 | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup | DPRD Kabupaten Cirebon, Kementerian LHK | |
| | | 4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi | Sekolah Berbudaya Lingkungan/Adi wiyata | 10 | 7 | 5 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat | |
| | g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 1) Integrasi bank sampah menjadi UMKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR | Unit/tahun | - | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan UMKM | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon | |
| | | 2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Produsen/tahun | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PMPTSP | |
| | | 3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Produsen/tahun | - | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PMPTSP | |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|--|---|------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|---|------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| | | | 4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Kelompok orang/ Bank sampah/ tahun | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UMKM | Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten | |
| | | | 5) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>beyond compliance</i>) | Pasar Tradisional/ tahun | - | - | - | 5 | 10 | 4 | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | |
| | | h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi: 1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur 3) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor pertel | Produsen/ tahun | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM | | |
| | | | 3) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman | Produsen/ tahun | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dunia usaha | | |

| NO. KEBLAKAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|----------------|--|--|--|---------------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|--|--|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 2. | a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga | 1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>) | Dokumen/tahun | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup | BKAD, Bappeitbangda |
| | | | 2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Dokumen/tahun | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup | BKAD, Bappeitbangda |
| | | | 3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Dokumen/tahun | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, | Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, BKAD |
| | | | 4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Dokumen/tahun | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PKPP | Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas ESDM |
| | | | 5) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum | Dokumen/tahun | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup | Satpol PP |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | |
|-----|-----------|----------|---|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------------------------------|--|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2025 |
| | | | 6) Penyusunan dan uji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup. Dinas PKPP | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Cirebon |
| | | | | Dokumen/tahun | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup. Dinas PKPP | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Cirebon |
| | | | | Dokumen/tahun | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup Dinas PKPP | Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Cirebon |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | |
|-----|-----------|----------|---|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|--|--|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2025 |
| | | | e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PKPP, Dinas PUPR | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Cirebon |
| | | | 7) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Cirebon |
| | | | b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Cirebon |
| | | | c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat, DPRD Prov. Jawa Barat, DPRD Kabupaten Cirebon |

| NO. KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | |
|---------------|----------|--|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|---------------------------------------|--|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2025 |
| | | d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Cirebon |
| | | e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Cirebon |
| | | 8) Penyusunan dan keji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Cirebon |
| | | b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup | Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Cirebon |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | |
|-----|-----------|----------|--|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------------------|--|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2025 |
| | | | a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup | Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Cirebon |
| | | | b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Cirebon |
| | | | c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Cirebon |
| | | | d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Cirebon |
| | | | e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup | Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Cirebon |

| NO. KEBLAKAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|----------------|---|--|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|----|--|--|------------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| | | 10) Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RFD) | Dokumen/tahun | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup | Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| | b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah | 1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam: | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) Penyediaan lahan | Dokumen/tahun | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Bappelitbangda | Bapenda, Dinas PUPR, Dinas PKPP | |
| | | b) Pembinaan pemulung | Kegiatan Sosialisasi/tahun | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Sosial, Dinas Perlindungan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM | |
| | | c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | BKAD, DPRD Kabupaten Cirebon | |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|---|---|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|--|--|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| | | | d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Dokumen/tahun | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Bappelitbangda | BKAD, DPRD Kabupaten Cirebon |
| | | | 2) Pembangunan dan revitalisasi TPA Gunung Santri | Unit/tahun | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Bappelitbangda, Dinas PKPP | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Cirebon |
| | | | 3) Pembangunan TPA baru | Dokumen/tahun | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | Dinas Lingkungan Hidup, Bappelitbangda, Dinas PKPP, Dinas PUPR | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Cirebon |
| | | c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganannya Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah | Pertemuan/tahun | 1 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Dinas Lingkungan Hidup, Bappelitbangda, Dinas PKPP | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Cirebon |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|---|---|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|--|--|------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| | | d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada: a) Pemerintah Pusat b) Pemerintah Provinsi Jawa Barat c) DPRD Kabupaten Cirebon | Konsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / tahun Konsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat / tahun Konsultasi dengan DPRD Kabupaten Cirebon | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Bappelitbangda, BPKAD | |

| NO. | KEBLAJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|------------|--|--|------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----|--|--|---|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| | | | 2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Orang/ tahun | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas PKPP, Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan/Desa |
| | | e. Pembentukan sistem informasi | Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di Kabupaten Cirebon | Dokumen/ tahun | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup, Bappelitbangda | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PRPP, Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE | 1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Kecamatan/ tahun | - | - | 10 | 20 | 10 | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup | DPRD Kabupaten Cirebon, BKAD, Dinas PKPP, Dinas PUPR | |

| NO. KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|---------------|----------|--|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------|---|--|------------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| | | 2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat | Kelurahan dan Desa/tahun | - | 2 | 20 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, Kelurahan/Desa | Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, Kelurahan/Desa. LSM Peduli Lingkungan | |
| | | 3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan | Unit/Kawasan (Pasar Tradisional)/tahun | - | - | - | 5 | 10 | 4 | - | - | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Cirebon, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | |
| | | 4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui: a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat | Unit / tahun | 39 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kecamatan, Kelurahan | | |
| | | b) Kawasan (TPSS3R) | Unit/tahun | 15 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Dinas PKPP, Dinas Lingkungan hidup | Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kecamatan, Kelurahan | | |

| NO. KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | |
|---------------|--|---|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------------------|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2025 |
| | | 5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan | Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Pelaku Usaha/tahun | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Dinas Lingkungan Hidup | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PKPP, dan pelaku usaha |
| | h. Penguatan penegakan hukum | 1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah kabupaten Cirebon, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Orang/tahun | 2 | 10 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Perhubungan, Polri, Kejaksaan, Satpol PP |
| | | 2) Pengawasan terhadap ketepatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Dokumen/tahun | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Perhubungan, Polri, Kejaksaan, Satpol PP |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|--|--|---------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|--|--|------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| | | i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah | Penanganan sampah secara mandiri oleh dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Pelaku usaha/tahun | - | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PMPTSP | |
| | | j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna | 1) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 2) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan di TPA Gunung Santiri | Dokumen/tahun Unit/tahun | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bappelitbangda, Dinas PKPP | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PUPR | |
| | | k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga | 1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Dokumen/tahun | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Pengelola Pasar Tradisional | | |

| NO. KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|---------------|--|--|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----|-----------------------------------|---|------------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| | dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan. | Pasar Tradisional/ tahun | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Pengelola kawasan komersial (Pasar Tradisional) | |
| | | 3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan. | Pasar Tradisional/ tahun | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP | Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Pengelola kawasan komersial (Pasar Tradisional) | |

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 46 SERI .3